

FACTORS AFFECTING THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL STATEMENTS

FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

**Nur Laila Yuliani
Rahmawati Dwi Agustini**

nurlailay.feummgl78@gmail.com
Universitas Muhammadiyah Magelang
Jalan Tidar No 21 Magelang

ABSTRACT

This study is aimed at examining factors affecting the quality of local government financial statements. These factors include the competence of human resources, financial accounting system application areas, use of information technology, application of accounting standards of governance and internal control. The research arose due to the low quality of financial reports of local governments in Indonesia. The research sample consists of 88 employees in SKPD in Magelang regency. The analytical tool used is through Multiple Linear Regression implemented in SPSS. This study provides evidence that the area of financial accounting system implementation and utilization of information technology has positive influence on the quality of local government financial statements. On the contrary, the competence of human resources, implementation of government accounting standards and internal control have no positive effect on the quality of local government financial statements.

Keywords: competence of human resources, financial accounting system application areas, use of information technology, application of accounting standards of governance, internal control, quality of local government financial statements

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor-faktor tersebut adalah kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern. Dorongan utama penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Sampel penelitian ini terdiri dari 88 pegawai di SKPD Kabupaten Magelang. Alat analisis yang digunakan adalah SPSS dengan Regresi Linier Berganda. Studi ini memberikan bukti bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pengendalian intern, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik di Indonesia dalam praktiknya saat ini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik, baik di pusat maupun di daerah. Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan keuangan pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat, DPRD, dan masyarakat sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemakai. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami..

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan Opini Wajar

Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), berarti dapat dikatakan bahwa laporan keuangan entitas tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Ada empat opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, karena kualitas laporan keuangan pemerintah daerah masih rendah. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz dalam keterangan pers usai sosialisasi BPK di Universitas Negeri Yogyakarta, Desember 2014. Harry mengatakan bahwa pemerintah daerah masih lamban dalam mengejar kualitas laporannya. Penilaian tersebut didasarkan fakta masih sedikitnya pemerintah daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ia menyebutkan sesuai data audit BPK tahun 2013 dari sebanyak 456 pemerintahan daerah, baru 34 daerah yang laporan keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) (Antara News, 2014).

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan standar akuntansi pemerintahan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu penelitian ini berusaha memberikan kontribusi pengetahuan dengan menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kabupaten Magelang. Karena kalangan Dewan menilai kinerja Pemerintah Kabupaten Magelang

dipandang kurang tegas dalam menindak berbagai pelanggaran yang terjadi di wilayahnya dan meminta pemerintah kabupaten segera berbenah dalam segala sisi. Permintaan itu disampaikan saat rapat Paripurna penetapan Raperda tentang laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang. Ketidaktegasan pemerintah Kabupaten Magelang adalah lambannya pengambilan tindakan atas hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2011. Banyak temuan BPK atas laporan keuangan pemerintah kabupaten Magelang tahun 2012 dibandingkan laporan sebelumnya, hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan keuangan masih lemah (Tribun Jogja, 27 Juli 2012).

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Jumlah SKPD di Kabupaten Magelang sebanyak 30 SKPD yang terdiri sekretariat daerah, inspektorat, 13 dinas, 7 badan, 3 kantor dan 5 kecamatan. Pengambilan sampel atau responden dilakukan secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan (Sekaran, 2003). Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Pejabat struktural dan aparat yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan di masing-masing SKPD
- b. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan.

Variabel penelitian dan Pengukuran Variabel Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Halim (2007), laporan keuangan daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah laporan keuangan pemerintah daerah meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai dari laporan keuangan. Variabel kualitas laporan keuangan pada penelitian ini diukur dengan instrumen yang mengacu pada penelitian Mulyana (2006) dan dikembangkan oleh Hanim (2009).

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (kelembagaan) atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Havesi, 2005). Variabel kompetensi sumber daya manusia dalam penelitian ini diukur dengan instrumen yang dibuat Xu, et al (2003) dan dikembangkan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008).

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Nordiawan, 2008). Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam penelitian ini diukur dengan instrumen yang mengacu pada penelitian Permadi (2013).

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah pemrosesan, pengolahan, dan penyebaran data yang didapat dari mengkombinasikan alat perangkat komputer dengan telekomunikasi (Jurnali dan Supomo, 2002). Variabel pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian ini diukur dengan instrumen yang mengacu pada penelitian Warisno (2009).

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian, 2007). Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan dalam penelitian ini diukur dengan instrumen yang mengacu pada penelitian Rohman (2007).

Pengendalian Intern

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh eksekutif (kepala daerah, instansi atau dinas, dan segenap personel), yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, dan efektivitas dan efisiensi operasi (Bastian, 2003). Variabel pengendalian intern dalam penelitian ini diukur dengan instrumen yang mengacu pada penelitian yang dilakukan Indriasari dan Nahartyo (2008).

Metode Analisis Data

Sebelum dianalisis dan di uji hipotesisnya, terlebih dahulu dilakukan uji validitas menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) dan uji reliabilitas menggunakan *Cronbach Alpha* (α) untuk melihat item dan keseluruhan kuesioner itu valid dan reliabel atau tidak. Setelah itu barulah melakukan analisis dan pengujian hipotesis dengan menggunakan Regresi Linier Berganda, Uji Koefisien Determinasi (r^2), Uji F (*Goodness of fit test*) dan Uji t. Model persamaan Regresi Linier berganda:

$$KLK = \alpha + \beta_1 KSDM + \beta_2 SAKD + \beta_3 TI + \beta_4 SAK + \beta_5 PI + e$$

Keterangan:

- KLK = Kualitas Laporan Keuangan
- KSDM = Kompetensi Sumber Daya Manusia
- SAKD = Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
- TI = Pemanfaatan Teknologi Informasi
- SAP = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
- PI = Pengendalian Intern
- α = Konstanta
- β = Koefesien
- e = error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel Penelitian

Sampel yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah pejabat struktural dan para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD yang merupakan dinas, badan, kantor yang berada di Kabupaten Magelang. Kuesioner yang disebar sebanyak 140 kuesioner, sedangkan yang kembali sebanyak 110 kuesioner (*response rate* 78,57%), tetapi yang bisa digunakan dan diolah dalam penelitian ini berjumlah 88 kuesioner. Sisanya tidak dapat digunakan karena kurang lengkapnya jawaban dan data.

Uji Validitas

Tabel 1
Cross Loading

	KLK	KSDM	SAKD	PTI	SAP	PI
KLK1*	0,090					
KLK2	0,524					
KLK3	0,801					
KLK4	0,865					
KLK5	0,732					
KLK6	0,711					
KLK7*	0,168					

	KLK	KSDM	SAKD	PTI	SAP	PI
KSDM1		0,603				
KSDM2*		0,279				
KSDM3*		0,016				
KSDM4		0,684				
KSDM5*		0,397				
KSDM6*		0,391				
KSDM7		0,789				
KSDM8		0,717				
KSDM9		0,812				
SAKD1			0,692			
SAKD2			0,715			
SAKD3			0,818			
SAKD4			0,811			
SAKD5			0,714			
SAKD6			0,812			
SAKD7			0,824			
SAKD8			0,758			
SAKD9			0,795			
SAKD10			0,763			
PTI1				0,669		
PTI2*				0,359		
PTI3*				0,074		
PTI4				0,651		
PTI5				0,577		
PTI6				0,726		
PTI7				0,839		
PTI8				0,794		
SAP1*				0,383		
SAP2				0,683		
SAP3*				0,411		
SAP4*				0,239		
SAP5*				0,198		
SAP6*				0,164		
SAP7				0,853		
SAP8				0,759		
SAP9				0,809		
SAP10				0,814		
SAP11				0,628		
SAP12				0,678		
PI1					0,644	
PI2					0,795	

	KLK	KSDM	SAKD	PTI	SAP	PI
PI3					0,759	
PI4					0,816	
PI5					0,844	
PI6					0,757	
PI7					0,744	

Uji Reliabilitas

Tabel 2
Pengujian Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
KLK	0,825	Reliabel
KSDM	0,824	Reliabel
SAKD	0,924	Reliabel
PTI	0,854	Reliabel
SAP	0,913	Reliabel
PI	0,883	Reliabel

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 3
Koefisien Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0,886	0,357		2,482	0,015
KSDM	0,119	0,079	0,169	1,505	0,136
SAKD	0,348	0,132	0,319	2,632	0,010
PTI	0,266	0,106	0,307	2,519	0,014
SAP	-0,147	0,097	-0,172	-1,523	0,132
PI	0,203	0,135	0,205	1,509	0,135

$$KLK = 0,886 + 0,119KSDM + 0,348SAKD + 0,266PTI - 0,147SAP + 0,203PI + e$$

Uji Hipotesis

Uji R² (Koefisien Determinasi)

Tabel 4
Uji R²

R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
0,755	0,570	0,544	0,26951

Uji F (*Goodness of Fit Test*)

Tabel 5
Uji F

<i>Sum of Square</i>	Df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
7,887	5	1,577	21,717	0,000
5,956	82	0,073		
13,843	87			

Uji t

Tabel 6
Uji t

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
KSDM	1,505	0,136	H ₁ tidak diterima
SAKD	2,632	0,010	H ₂ diterima
PTI	2,519	0,014	H ₃ diterima
SAP	-1,523	0,132	H ₄ tidak diterima
PI	1,509	0,135	H ₅ tidak diterima

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa t hitung 1,505 dan $p\ value=0,136 > \alpha=0,05$, artinya kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka **H₁ tidak diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa sub-bagian akuntansi atau keuangan SKPD di Kabupaten Magelang memiliki kompetensi sumber daya yang kurang memadai dari segi kuantitas dan kualitas dalam pembuatan laporan keuangan yang berkualitas. Rata-rata pegawai bagian akuntansi atau keuangan SKPD di Kabupaten Magelang bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi sehingga dalam penyusunan laporan keuangan tidak sesuai dengan disiplin ilmu akuntansi. Karena kompetensi yang dimiliki oleh pegawai pengelola keuangan akan mempengaruhi tingkat kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan. Jika kompetensi sumber daya manusia

dilaksanakan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan daerah akan meningkat, sehingga laporan keuangan yang baik dapat memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Dengan demikian kompetensi sumber daya manusia ditunjukkan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dapat diterapkan.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa t hitung 2,632 dan $p\ value=0,010 < \alpha=0,05$, artinya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga **H₂ diterima**. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Apabila penerapan sistem akuntansi keuangan daerah pada pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku maka akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, begitu juga sebaliknya, apabila penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak sesuai dengan aturannya maka laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas. Pemahaman terhadap sistem akuntansi daerah sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan tidak mengandung salah saji material. Hasil ini menunjukkan bahwa SKPD di Kabupaten Magelang telah menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa t hitung 2,519 dan p value=0,014 < $\alpha=0,05$, artinya pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sehingga **H₃ diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa sub bagian akuntansi atau keuangan telah melakukan pengolahan data transaksi keuangan dengan menggunakan *software* yang sesuai dengan perundang-undangan, laporan yang dihasilkan berasal dari sistem informasi yang terintegrasi, serta adanya jadwal pemeliharaan secara teratur atau peralatan yang usang atau rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya. Penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing SKPD di Kabupaten Magelang menganggap bahwa pemanfaatan teknologi informasi ada kaitannya terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini mendukung literatur-literatur yang berkaitan dengan manfaat dari suatu teknologi informasi dalam suatu organisasi, bagi pemerintah daerah yang harus mengelola APBD dimana volume transaksinya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang kompleks.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa t hitung -1,523 dan p value=0,132 > $\alpha=0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan

keuangan pemerintah daerah yang artinya bahwa **H₄ tidak diterima**. Artinya penerapan standar akuntansi pemerintahan di Kabupaten Magelang belum maksimal, sehingga dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang memberlakukan SAP berbasis akrual untuk pendapatan, belanja, aset dan ekuitas paling lambat tahun 2015, mengungkapkan adanya kasus terkait ketidaksiapan pemerintah daerah dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual. Kasus-kasus tersebut pada umumnya terjadi karena keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah daerah, kurangnya sosialisasi dan pelatihan, dan sistem atau aplikasi yang belum mendukung (BPK, 2014). Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka perlu adanya sosialisasi dan pelatihan mengenai standar akuntansi pemerintahan sehingga akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia terutama bagian akuntansi atau tata usaha keuangan yang ada pada pemerintah daerah.

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil pengujian menunjukkan bahwa t hitung 1,509 dan p value=0,135 > $\alpha=0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang artinya bahwa **H₅ tidak diterima**. Hal ini menunjukkan bahwa masih lemahnya pengendalian intern pada SKPD di Kabupaten Magelang. Kelemahan pengendalian intern disebabkan sub bagian akuntansi atau keuangan di SKPD belum sepenuhnya menyelenggarakan sistem akuntansi yang meliputi prosedur

akuntansi penerimaan kas, pengeluaran kas, aset dan selain kas. Selain itu, transaksi yang ada dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak berwenang, setiap transaksi yang terjadi kurang didukung dengan bukti yang valid dan sah, dan tidak adanya pemisahan tugas dalam rangka pelaksanaan APBD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Saran

Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya SKPD se-wilayah karesidenan Kedu.

Pada penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang diduga dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, misalnya komitmen organisasi, pengawasan internal, dan kepemimpinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Daniel Kartika dan Suhardjo Yohanes. 2013. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*. Vol. 5 No. 3.
- Badan Pemeriksa Keuangan 2014. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014. Melalui <http://www.bpk.go.id> diunduh tanggal 25 Februari 2015
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Ihsanti, Emilda. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Study Empiris pada SKPD Kabupaten Lima Puluh Kota). *E-journal Universitas Negeri Padang*. Vol. 2 No. 2
- Jensen, Mc and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm, Managerial Behaviour, Agency Costs & Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*. Vol 3 October. Pp 305-360
- Mahaputra, I Putu Upabayu Rama dan I Wayan Putra. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nurillah, Nur Asyfa dan Dul Muid. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Study pada SKPD Kota Depok), *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol 3 No. 2.
- _____. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Roviyantie, Devi. 2012. Pengaruh Kompetensi Sumber daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Accounting*. Vol 1 No. 1.
- Sukmaningrum, Tantraini. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 1
- _____. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- _____. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Warisno. 2009. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi. Tesis. Medan: Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatra Utara.
- Wati, Kadek Desiana, Nyoman Trisna herawati, dan Ni Kadek Sinarwati. 2014. Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, *e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 2 No. 1.